

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI DAN TENAGA KERJA  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2000-2014**

**(Tesis)**

**Oleh**

**DEFIA RISKI ANGGARINI**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

# **PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2000-2014**

**Oleh**

**DEFIA RISKI ANGGARINI**

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang dihasilkan dari pelaksanaan reformasi pada tahun 1998. Provinsi Lampung melaksanakan kebijakan ini sejak tahun 2000. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal, investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2000-2014. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah desentralisasi, investasi dan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 2000-2014. analisis dilakukan dengan menggunakan model ECM (*Error Corection Model*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Sedangkan variabel investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.

**Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Investasi, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan  
Ekonomi**

## **ABSTRACT**

### **EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION, INVESTMENT AND LABOR ON ECONOMIC GROWTH IN LAMPUNG PROVINCE PERIOD 2000-2014**

**By**

**DEFIA RISKI ANGGARINI**

The policy of decentralization and regional autonomy is, a policy that resulted from the implementation of reform in 1998. Lampung Province implemented this policy since 2000. The research purpose to see the effect of fiscal decentralization, investment and labor on the economic growth in Lampung Province period 2000-2014. Independent variables in this research are decentralization, investment and labor. The research uses time series data from 2000-2014. Analysis in this research using by ECM model (Error Corection Model). The results of this research are fiscal decentralization and labor have a positive and significant effect on economic growth in Lampung Province. While investment variable has positive and not significant effect on economic growth of Lampung Province.

**Keywords: Fiscal Decentralization, Investment, Labor and Economic Growth**

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INVESTASI DAN TENAGA KERJA  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2000-2014**

**Oleh  
DEFIA RISKI ANGGARINI**

**Tesis  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER SAINS**

**Pada  
Jurusan Magister Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Tesis : **PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL,  
INVESTASI DAN TENAGA KERJA  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2000-2014**

Nama Mahasiswa : **Defia Riski Anggarini**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1321021010

Jurusan : Magister Ilmu Ekonomi

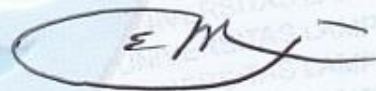
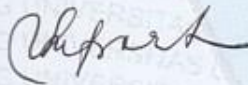
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

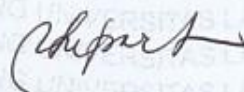
Pembimbing II



**Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.**  
NIP 19611209 198803 1 003

**Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**  
NIP 19670710 199003 2 001

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi**

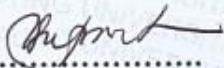



**Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.**  
NIP 19611209 198803 1 003




## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

1.1 Ketua Komisi Penguji : **Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.** 

1.2 Anggota Komisi Penguji : **Dr. Saimul, S.E., M.Si.** 

1.3 Anggota Komisi Penguji : **Dr. Arivina Ratih Taher, S.E., M.M.** 

1.4 Sekretaris : **Dr. Marselina, S.E., M.P.M.** 

### 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

  
**Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 19610904 198703 1 011

### 3. Direktur Program Pascasarjana

  
**Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.**  
NIP 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **4 Oktober 2017**

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai peraturan yang berlaku.”

Bandar Lampung, 4 Oktober 2017



**Defia Riski Anggarini**

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 Desember 1991. Sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah cinta dari pasangan (Alm) Bapak A.Mustofa dan (Alm) Ibu Danimah Nurman.

Pendidikan yang penulis tempuh Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukarame Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2003. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2006. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung jurusan Ekonomi Pembangunan diselesaikan pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S-2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Program Studi Magister Ilmu Ekonomi pada tahun 2013 melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).



**MOTTO:**

**Sesungguhnya dibalik semua kesusahan itu ada kemudahan. Allah SWT tidak akan memberikan ujian diluar kemampuan umatnya.**

**Berdoalah sebanyak yang kau bisa. suatu hari nanti Allah akan menjawab semua doa yang kau pinta.**

**Ketika ketulusanmu sudah tidak dihargai lagi. Balaslah dengan keikhlasan. Lalu pergilah tanpa pernah menengok ke belakang.**

**Don't Give Up because Allah with us ^^**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan Allah SWT, kupersembahkan karya sederhana ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada yang tersayang:

### **Orang tuaku**

(Alm) A. Mustofa Ak dan (Alm) Danimah Nurman. Terima kasih atas semua pengorbanan, kasih sayang dan doa yang telah diberikan. Mama dan papa selamanya ada di hati. semoga suatu hari nanti kita bisa berkumpul kembali.

### **Suamiku**

Cece Purwanto. Terima kasih atas semua dukungannya. Aku tahu, kamu mau aku jadi yang terbaik. Mudah-mudahan semua harapan kamu jadi kenyataan.

### **Buah Hatiku**

Jatmiko Haryo Purwanto. Terima kasih telah menjadi penyemangat ibu dikala putus asa datang, penghibur ibu dikala duka dan menjadi alasan ibu untuk selalu berusaha jadi yang terbaik untuk Mas Iko. I Love you so much ^^

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2000-2014". Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Sains Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung.

Penulis telah banyak menerima bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E, M.Si. selalu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E, M.Si. selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Ekonomi dan juga selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam proses penyusunan tesis ini hingga akhir kepada penulis.
4. Ibu Dr. Marselina, S.E, M.P.M. selaku Pembimbing kedua yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam proses penyusunan tesis ini hingga akhir kepada penulis.
5. Bapak Dr. Saimul, S.E, M.Si. selaku penguji pertama yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Ibu Dr. Arivina Ratih, S.E, M.M. selaku penguji kedua yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak dan ibu dosen Magister Ilmu Ekonomi yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.

8. Teman-teman MIE Angkatan 2013. Mbak

Movi, Mbak Dewi, Mbak Eka, Mbak Sri, Mbak Tria, Mas Darna dan Kak Amar. Terima Kasih atas pertemanan dan persahabatan kita selama menjalani masa perkuliahan. Ada pertemuan dan pasti ada perpisahan, semoga kita bisa bertemu lagi dilain kesempatan. Sukses untuk kita semua. Amin.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan pengorbanan bapak, ibu dan teman-teman. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi penulis berharap semoga karya ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2017

Penulis

**Defia Riski Anggarini**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pertumbuhan Ekonomi.....	12
B. Kebijakan Fiskal.....	15
C. Otonomi Daerah .....	17
D. Desentralisasi Fiskal .....	18
E. Desentralisasi Fiskal Indonesia .....	20
F. APBD.....	22
G. Investasi .....	26
H. Akumulasi Modal Manusia.....	27
I. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	28
J. Penelitian Terdahulu.....	30
K. Kerangka Pemikiran .....	35
L. Hipotesis .....	37
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	39
B. Metode Analisis.....	41
C. Pengujian Model <i>Time Series</i> .....	42
D. Pengujian Hipotesis.....	45
1. Uji F .....	45
2. Uji t .....	45
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	47
B. Implementasi Desentralisasi Fiskal Provinsi Lampung .....	51

C.Pembahasan .....	59
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	65
A. Saran.....	66

## **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Provinsi Lampung Tahun 2000-2014 (dalam rupiah).....	4
2. Perkembangan Daerah Pemekaran Provinsi Lampung Tahun 2000-2015 .....	5
3. PDRB Provinsi Lampung Tahun 2000-2015 (dalam rupiah) .....	6
4. Realisasi Investasi Provinsi Lampung 2000-2014.....	8
5. Angkatan Kerja Provinsi Lampung Tahun 2000-2015 (dalam jiwa).....	9
6. Penelitian Terdahulu .....	33
7. Hasil Uji Stasionaritas Pada Level.....	47
8. Hasil Uji Stasionaritas Pada First-Difference .....	48
9. Hasil Uji Kointegrasi .....	48
10. Hasil Uji F Pada Model ECM.....	50
11. Hasil Uji-t Pada Model ECM.....	51
12. Derajat Desentralisasi Fiskal yang Diukur dari Pendapatan Asli Daerah ( $\Delta PAD + \Delta DBH$ ) terhadap Total Penerimaan Pemerintah Daerah ( $\Delta APBD$ ) Se-Pulau Sumatera .....	52
13. Sumber Keuangan di Provinsi Lampung .....	54
14. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal .....	55
15. Alokasi Belanja Daerah terhadap Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2014( dalam persen) .....	56

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Output Steady State dan Investasi.....	14
2. Komponen Penerimaan Daerah Diera Desentralisasi Fiskal Di Indonesia .....	21
3. Kerangka Pemikiran Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2000-2014 .....	37
4. Alokasi Belanja Daerah terhadap Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Di Provinsi Lampung Tahun 2000-2014.	57

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Data Pertumbuhan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung .....	v
2. Hasil uji unit root pada orde level .....	vi
3. Hasil uji unit root pada orde first difference .....	ix
4. Hasil Regresi Kointegrasi Engle-Granger .....	xiii
5. Hasil Uji Kointegrasi .....	xiii
6. Hasil Estimasi ECM.....	xiv
7. Desentralisasi Fiskal Se-Pulau Sumatera.....	xiv
8. Alokasi Belanja Daerah yang Terdiri dari Belanja Pegawai Belanja Modal serta Belanja Barang dan jasa.....	xv
9. Rata-Rata Alokasi Belanja Daerah yang Terdiri Dari Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa di Pulau Sumatera .....	xv
10. Sumber-sumber Keuangan Provinsi Lampung Tahun 1999-2000.....	xvi

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang dihasilkan dari pelaksanaan reformasi pada tahun 1998. Tuntutan dari pelaksanaan reformasi tersebut melahirkan undang-undang otonomi daerah, yaitu UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta menjadi awal era baru desentralisasi fiskal di Indonesia.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam UU RI No. 5 Tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, hanya dalam prosesnya desentralisasi masih bersifat terbatas sehingga belum mampu mengurangi ketimpangan antar daerah dan wilayah (Sjahfrizal, 1997). Desentralisasi fiskal di Indonesia mulai aktif dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaannya diawali dengan penyempurnaan terhadap kedua UU yang telah ada, yaitu UU No. 12 Tahun 2008 mengganti UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta UU No. 33 Tahun 2004 mengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hasil studi tentang pelaksanaan proses desentralisasi fiskal sering kali menimbulkan pro dan kontra diantara para peneliti. Beberapa silang pendapat yang masing-masing telah membuktikannya secara empiris, hasil studi dari Davoodi dan Zou (1998) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Zhang dan Zou (1998) juga mendapatkan hasil yang sama bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertentangan mengenai fenomena proses pelaksanaan desentralisasi telah menghasilkan penelitian yang baru, Breuss dan Eller (2004) menyatakan bahwa

ada efek ambivalent dalam hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga menyimpulkan bahwa tidak ada kejelasan antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Smith (1985) menjelaskan bahwa untuk Negara berkembang ada tiga alasan mengapa penting dalam melaksanakan proses desentralisasi fiskal, yaitu: untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, untuk memperluas otonomi daerah, dan sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik. Hal serupa juga diungkapkan oleh Hirawan (2007) yang menyatakan bahwa otonomi daerah sebagai landasan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah memenuhi tujuan demokratis yaitu demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, Mardiasmo (2002) mengungkapkan bahwa pada dasarnya desentralisasi fiskal memiliki tiga misi utama, yakni: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa kebijakan desentralisasi ini diciptakan untuk pengambilan keputusan publik yang lebih baik dan memberikan pelayanan masyarakat yang optimal sehingga diharapkan bahwa tujuan pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat dapat cepat tercapai.

Zhang dan Zou (1998) menunjukkan bagaimana kebijakan desentralisasi fiskal dan pengalokasian sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tobin Im dan Seung Jong Lee (2000) yang menunjukkan bagaimana waktu pelaksanaan desentralisasi fiskal sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut. Serta penelitian yang dilakukan Alisjahbana (2000) mengenai desentralisasi fiskal dan kebijakan pembangunan ekonomi yang mana menunjukkan hasil bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dalam era desentralisasi tidak hanya tergantung pada aspek penerimaan daerah tetapi tergantung pada bagaimana kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangannya yang nantinya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Hal sebaliknya diperoleh dari hasil studi Iimi (2005) dan Malik dkk (2006) menunjukkan hasil berbeda yaitu desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Iimi (2005) tentang *Decentralization and Economic Growth: An Empirical Note* yang menunjukkan hasil bahwa pada akhir tahun 1990-an desentralisasi fiskal merupakan suatu instrument dari pertumbuhan ekonomi. Serta penelitian yang dilakukan Rodden, Eskeland, Litvack (2003) menunjukkan hasil bahwa desentralisasi fiskal menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah lokal dalam mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah yang dapat diukur dari proporsi defisit fiskal terhadap total pendapatan.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menuntut pemerintah di daerah untuk dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya agar dapat melaksanakan dan membiayai urusan rumah tangganya, sehingga tujuan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengurangi subsidi dari pemerintah pusat, mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah dapat tercapai dengan baik (Suparmoko, 2002).

Provinsi Lampung merupakan daerah yang telah melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 2000. Sebagai daerah otonom yang melaksanakan kebijakan tersebut, Provinsi Lampung diharapkan dapat menciptakan pembangunan ekonomi regional guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal memerlukan sumber-sumber keuangan. Keuangan daerah bersumber dari pemerintah daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

Sumber keuangan Provinsi Lampung yang terdiri dari PAD dan Dana Perimbangan dari tahun 1999-2014 dapat terlihat di Tabel 1.



**Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Provinsi Lampung Tahun 1999-2014 (jutaan rupiah).**

TAHUN	PAD	DANA PERIMBANGAN
1999	47.904.198.967	48.662.308.579
2000	57.904.198.967	42.350.126.000
2001	148.063.920.000	180.303.370.000
2002	237.011.650.000	211.110.000.000
2003	306.859.130.000	263.925.790.000
2004	410.682.090.000	286.822.000.000
2005	549.657.850.000	310.835.000.000
2006	631.981.960.000	460.898.000.000
2007	674.693.661.673	509.656.000.000
2008	891.531.463.532	593.261.930.000
2009	958.603.623.635	3.972.399.700.000
2010	320.096.000.000	3.570.293.000.000
2011	1.085.424.022.567	1.002.821.000.000
2012	1.600.273.135.553	970.226.927.000
2013	2.183.413.478.756	1.120.771.413.000
2014	1.509.591.414.874	961.366.316.000

Sumber: Data diolah, Lampiran 10.

Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada PAD Provinsi Lampung dari tahun 2000 sebesar Rp 57.904.198.967,00 sampai tahun 2010 sebesar Rp 320.096.000.000,00 hingga pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.085.424.022.567,00 akan tetapi terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 sebesar Rp 2.183.413.478.756,00. Begitu pula dengan dana perimbangan yang mengalami peningkatan dari tahun 2000 sebesar Rp 42.350.126.000,00 hingga tahun 2009 sebesar Rp 3.972.399.700.000,00 dan mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar R 3.570.293.000.000,00, akan tetapi terus mengalami penurunan hingga tahun 2013 sebesar Rp 1.120.771.413.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp 961.366.316.000,00. Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada tahun 2008-2010, hal ini pula diwarnai oleh maraknya pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah di Provinsi Lampung yang semula hanya berjumlah 8 kabupaten dan 2 kota, sekarang pada tahun 2015

menjadi 13 kabupaten dan 2 kota. Akan tetapi jumlah dana perimbangan mengalami penurunan mulai tahun 2011-2014. Hal ini berarti bahwa pemerintah Provinsi Lampung mulai mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Perkembangan daerah pemekaran di Provinsi Lampung dapat terlihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Perkembangan Daerah Pemekaran di Provinsi Lampung 2000-2015**

No.	Kota/Kabupaten	Dasar Hukum	Tahun	Keterangan
1.	Kota Bandar Lampung	UU No.28/1959	1959	Daerah Induk
2.	Lampung Utara	UU No.28/1959	1959	Daerah Induk
3.	Lampung Selatan	UU No.28/1959	1959	Daerah Induk
4.	Lampung Tengah	UU No.28/1959	1959	Daerah Induk
5.	Lampung Barat	UU No. 6/1991	1991	Pemekaran Lam-Utara
6.	Tanggamus	UU No. 2/1997	1997	Pemekaran Lam-Selatan
7.	Tulang Bawang	UU No. 2/1997	1997	Pemekaran Lam-Utara
8.	Lampung Timur	UU No.12/1999	1999	Pemekaran Lam-Tengah
9.	Kota Metro	UU No.12/1999	1999	Pemekaran Lam-Tengah
10.	Way Kanan	UU No.12/1999	1999	Pemekaran Lam-Utara
11.	Pesawaran	UU No. 33/2007	2007	Pemekaran Lam-Selatan
12.	Pringsewu	UU No. 48/2008	2008	Pemekaran Tanggamus
13.	Mesuji	UU No. 49/2008	2008	Pemekaran Tulang Bawang
14.	Tulang Bawang Barat	UU No. 50/2008	2008	Pemekaran Tulang Bawang
15.	Pesisir Barat	UU No. 22/2012	2012	Pemekaran Lam-Barat

Sumber: Lampung Dalam Angka, 2014.

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah terciptanya daerah yang mandiri yang dapat menjalankan kegiatannya dengan memanfaatkan dan terus menggali sumber daya yang dimilikinya, serta tidak lagi bergantung pada

pemerintah pusat sehingga terciptanya pembangunan ekonomi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi regional, dan hal ini akan tercermin dalam peningkatan jumlah pendapatan perkapita/PDRB per-kapita (Zulyanto, 2010). Kuznets dalam Jhingan (2004) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tercermin dalam nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahun hal ini dapat terlihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. PDRB Provinsi Lampung 2000-2015 (dalam rupiah).**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB</b>
2001	23.749.066.660.000
2002	24.676.013.290.000
2003	26.065.200.900.000
2004	27.567.276.530.000
2005	28.765.508.280.000
2006	30.367.000.000.000
2007	32.232.000.000.000
2008	33.951.000.000.000
2009	35.759.000.000.000
2010	38.015.000.000.000
2011	40.463.000.000.000
2012	43.116.000.000.000
2013	45.652.000.000.000
2014	50.189.800.000.000

Sumber:Perkembangan beberapa Indikator Sosial Ekonomi Indonesia 2014, BPS.

Tabel 3 di atas menggambarkan perkembangan PDRB Provinsi Lampung. Tahun 2001 PDRB Provinsi Lampung sebesar Rp. 23.749.066.660.000,00. Tahun 2005 mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.765.508.280.000. Tahun 2009 juga

mengalami peningkatan sebesar Rp. 35.759.000.000.000,00 hingga pada tahun 2014 PDRB Provinsi Lampung sebesar Rp. 50.189.800.000.000,00.

Jhingan (2004) mengemukakan bahwa investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua sisi, yaitu: sisi permintaan, investasi akan menciptakan atau menghasilkan pendapatan (*return on investment*), sedangkan sisi penawaran investasi meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan persediaan atau akumulasi modal. Mankiw (2003) mengatakan bahwa terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal yaitu: investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, hal ini menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang.

Investasi di Provinsi Lampung terdiri atas PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang jumlahnya setiap tahun semakin meningkat, dengan meningkatnya jumlah investasi di Provinsi Lampung dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Realisasi investasi di Provinsi Lampung dapat terlihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Realisasi Investasi Di Provinsi Lampung 2000-2014.**

Tahun	Realisasi Investasi		Total
	PMA	PMDN	
2000	9.923.130.940,00	3.823.126.605,00	13.746.257.545,00
2001	8.673.356.789,00	7.935.071.593,00	16.608.428.382,00
2002	43.201.285.380,00	56.300.952.920,00	99.502.238.300,00
2003	10.547.874.596,00	9.125.919.808,00	19.673.794.404,00
2004	102.340.821.934,00	118.345.643.900,00	220.686.465.834,00
2005	81.301.221.404,00	103.454.563.300,00	184.755.784.704,00
2006	80.246.199.809,00	83.780.225.000,00	164.026.424.809,00
2007	410.934.653.608,00	869.238.500.128,00	1.280.173.153.736,00
2008	598.952.479.720,00	806.789.245.000,00	1.405.741.724.720,00
2009	333.534.860.000,00	532.186.140.000,00	865.721.000.000,00
2010	294.301.589.790,00	254.320.146.000,00	548.621.735.790,00
2011	800.620.160.000,00	739.286.140.000,00	1.539.906.300.000,00
2012	565.199.871.000,00	802.208.900.000,00	1.367.408.771.000,00
2013	705.927.166.088,00	1.205.248.752.146,00	1.911.175.918.234,00
2014	621.790.000.000,00	1.644.870.000.000,00	2.266.660.000.000,00
<b>Total</b>			<b>11.904.407.997.458,00</b>

Sumber: BPMP Provinsi Lampung 2015

Tabel 4 di atas menggambarkan realisasi investasi di Provinsi Lampung yang dimulai pada tahun 2000 sebesar Rp 13.746.257.545,00. Kemudian tahun 2003 sebesar Rp 16.608.428.382,00, tahun 2006 meningkat sebesar Rp 164.026.424.809,00, tahun 2009 sebesar Rp 865.721.000.000,00 dan tahun 2013 sebesar Rp 1.911.175.918.234,00 dan tahun 2014 sebesar Rp 2.266.660.000.000,00.

Untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan modal manusia (*human capital*) yang berkualitas untuk dapat menyerap teknologi modern. Populasi yang besar adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga dapat menciptakan skala ekonomi (*economies of scale*) (Todaro dan Smith, 2006).

Akai dan Sakata (2002) menggunakan modal manusia sebagai variabel kontrol dalam meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dalam periode waktu 1992-1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Modal Manusia (*human capital*) di Propinsi Lampung tercermin dalam jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja di Propinsi Lampung mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun 2000-2015. Perkembangan tenaga kerja Propinsi Lampung dapat terlihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Tenaga Kerja Di Propinsi Lampung 2000-2015 (dalam jiwa)**

Tahun	Tenaga Kerja
2000	3.254.743
2001	3.212.575
2002	3.308.558
2003	3.316.226
2004	2.032.491
2005	1.745.667
2006	736.526
2007	701.264
2008	1.365.691
2009	3.738.337
2010	2.835.778
2011	2.431.040
2012	3.932.239
2013	3.696.066
2014	1.033.357
2015	4.060.700

Sumber: BPS, Indikator Tenaga Kerja Provinsi Lampung 2000-2015.

Tabel 5 di atas menggambarkan perkembangan jumlah tenaga kerja di Provinsi Lampung dari tahun 2000-2015. Tahun 2000 jumlah tenaga kerja sebesar 3.254.743 jiwa. Tahun 2003 meningkat sebesar 3.316.226 jiwa. Tahun 2004-2007 mengalami penurunan jumlah tenaga kerja. Tahun 2007 sebesar 701.264 jiwa. Tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 3.738.337 jiwa. Hingga tahun 2015 jumlah tenaga kerja sebesar 4.060.700.



Berdasarkan kondisi di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Lampung.

## **B. Permasalahan**

Dalam penelitian ini, terdapat dua hal penting yang melatar belakangi keinginan peneliti untuk menggali lebih jauh tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal di Propinsi Lampung. *Pertama*. Adanya *research gap* yang terjadi pada berbagai penelitian terdahulu tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada satu sisi kebijakan desentralisasi diyakini dapat membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga mendorong banyak Negara-negara berkembang untuk menerapkannya sebagaimana telah disimpulkan Malik dkk (2006), Iimi (2005), Zhang dan Zou (1997). Namun sebaliknya, pada kasus lain kebijakan desentralisasi justru berdampak negatif bagi pembangunan ekonomi suatu negara sebagaimana disimpulkan oleh hasil studi Davoodi dan Zou (1998), Khusaini dan Prasetya (2004).

Investasi memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana telah disimpulkan oleh Hariyanto (2012), Zulyanto (2010), Zhang dan Zou (1997), akan tetapi investasi juga memiliki pengaruh negatif sebagaimana hasil studi Davoodi dan Zou (1998). Tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana telah disimpulkan pula oleh Hariyanto (2012), Zulyanto (2010), Iimi (2005) namun sebaliknya, tenaga kerja memiliki pengaruh negatif sebagaimana telah disimpulkan oleh Khusaini dan Prasetya (2004).

*Kedua*. Mardiasmo (2007) yang menyatakan bahwa besarnya dana transfer didaerah seharusnya memiliki korelasi yang positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Fakta bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal ternyata belum mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yakni besarnya jumlah pendapatan perkapita masyarakat di Provinsi Lampung masih sangat kecil yaitu hanya setengah dari rata-rata pendapatan nasional.

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2000-2014?
2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2000-2014?
3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2000-2014?
4. Implementasi desentralisasi fiskal di Provinsi Lampung.

### **C. Tujuan**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2000-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2000-2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2000-2014.
4. Mengetahui implementasi desentralisasi fiskal di Provinsi Lampung.

### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri dari :

**BAB I** :Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** :Tinjauan pustaka mencakup tentang teori-teori yang menjadi landasan atau acuan bagi penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis.

**BAB III** :Metode penelitian yang meliputi jenis dan sumber data, batasan peubah variabel, alat analisis, pengujian hipotesis

**BAB IV** :Hasil perhitungan dan pembahasan, membahas uraian tentang hasil perhitungan serta mengimplikasinya.

**BAB V** :Simpulan dan saran yang menyajikan kesimpulan dan saran dari penulis yang didasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pertumbuhan Ekonomi

Kuznets dalam Jhingan (2004) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Tinjauan ekonomi mengenai pertumbuhan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Mankiw (2003), PDB dapat dipandang dalam dua hal yaitu total pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian dan total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam ekonomi.

Rostow mencetuskan suatu model tahapan pertumbuhan ekonomi (*the stage of economic growth*) kedalam lima tahap. Adapun lima tahapan pertumbuhan tersebut antara lain; masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, gerakan kearah kedewasaan dan masa konsumsi tinggi (Rustiadi, 2007). Todaro dan Smith (2003) mengidentifikasi bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu:

#### 1. Akumulasi modal

Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari.

#### 2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi.

### 3. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional. Keberagaman sifat teknologi yaitu; pertama, teknologi bersifat netral apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. Kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, dan ketiga kemajuan teknologi hemat modal.

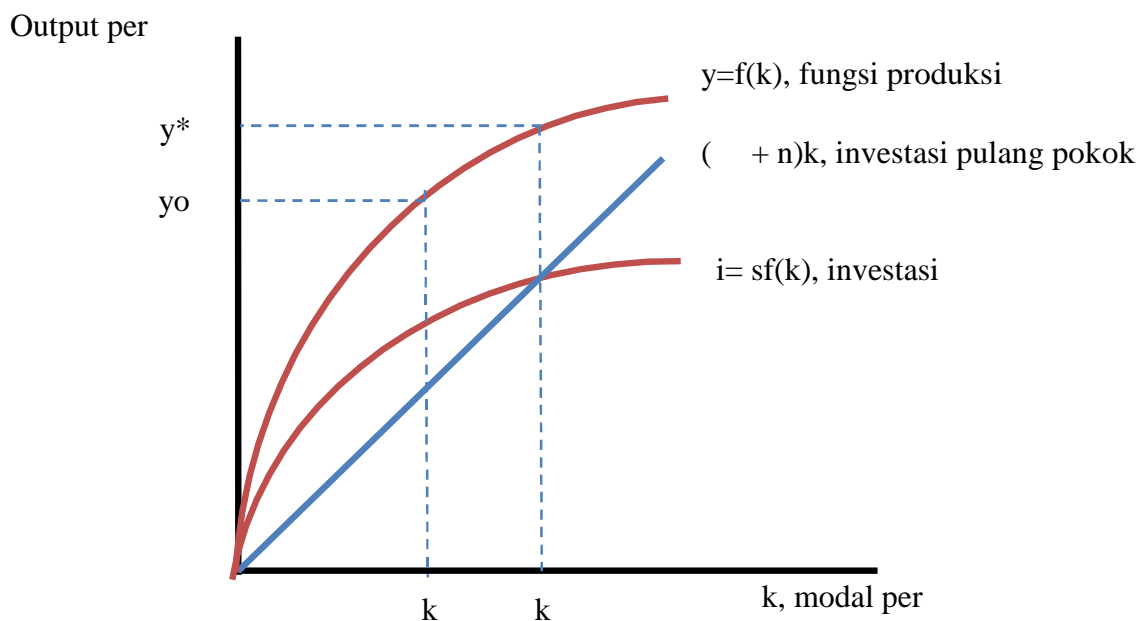
Ketiga faktor di atas juga menjadi determinan penting dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai model pertumbuhan solow (*solow growth model*). Suatu model yang dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan (Mankiw, 2003). Dalam model Solow (Mankiw, 2003) output atau jumlah barang yang dihasilkan dalam perekonomian tergantung pada persediaan modal dan tenaga kerja melalui sebuah fungsi produksi yang memiliki skala hasil konstan.

$$Y = F(K, L)$$

Dimana asumsi skala hasil konstan membagi kedua sisi dengan L (pekerja) maka dapat juga di identifikasikan bahwa output per pekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja, yaitu  $Y/L = F(K/L, 1)$ , dan selanjutnya dapat ditulis persamaan  $y = f(k)$ , yang menggambarkan bahwa output per pekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja. Persediaan modal menjadi determinan output perekonomian yang paling penting karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Kekuatan utama yang dapat mempengaruhi persediaan modal adalah investasi dan depresiasi. Dalam jangka panjang persediaan modal ini akan menuju suatu tingkat modal pada kondisi mapan (*steady state level of capital*), yaitu dimana dalam perekonomian berlaku tingkat investasi yang sama dengan depresiasi sehingga perubahan

persediaan modal ( $k$ ) dan output  $f(k)$  adalah tetap. Notasi yang umum digunakan untuk menunjukkan kondisi ini adalah  $k^*$  (Mankiw, 2003).

Solow (Mankiw, 2003) pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi merupakan variabel lainnya yang turut mempengaruhi output dan perekonomian suatu negara. Sebagaimana depresiasi yang mengurangi persediaan modal per pekerja, pertumbuhan penduduk pun akan menyebabkan hal yang sama. Artinya semakin besar jumlah penduduk, maka semakin kecil jumlah modal per pekerja dan berdampak pada rendahnya output per pekerja. Untuk mencapai kondisi mapan, maka dalam perekonomian memerlukan tingkat investasi yang dapat mempengaruhi depresiasi dan pertumbuhan penduduk atau yang disebut investasi pulang pokok, yaitu  $k = i - (n + \delta)k$  sebagaimana gambar dibawah ini;



Sumber: Mankiw (2003)

**Gambar 1. Output Steady State dan investasi**

Hal yang penting di atas adalah meskipun dalam kondisi mapan modal dan output per pekerja adalah konstan, akan tetapi dalam perekonomian output total dan modal total tetap bertambah dari waktu ke waktu. Sedangkan kemajuan teknologi

menurut Solow merupakan variabel eksogen yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi sepanjang waktu, sehingga direfleksikan sebagai efisiensi tenaga kerja (Mankiw, 2003). Dengan demikian, berdasarkan model Solow secara bersama-sama pertumbuhan modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi memiliki kontribusi penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

## **B. Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan untuk memperbaiki keadaan ekonomi (Rahayu, 2010). Dalam mengatur anggaran pengeluaran dan penerimaan, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal. Operasionalisasi dari kebijakan ini dapat berupa pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi dan pengelolaan pendapatan. Keseluruhan fungsi fiskal ini dapat tercapai secara berkelanjutan jika penerimaan negara (pemerintah) sesuai dengan kebutuhan pengeluarannya.

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tertuang dalam APBN sebagai suatu rencana operasi keuangan pemerintah.

- a) Peningkatan penerimaan karena perubahan tarif pajak akan berpengaruh pada ekonomi
- b) Pengeluaran pemerintah akan berpengaruh pada stimulasi pada perekonomian melalui dampaknya terhadap sisi pengeluaran agregat
- c) Politik anggaran (surplus, berimbang, atau defisit) sebagai respon atas suatu kondisi

- d) Strategi pembiayaan dan pengelolaan hutang (Kebijakan Fiskal Dan Penyusunan APBN, Direktorat Jendral Anggaran).

Definisi lain menyebutkan, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) uang pemerintah (Basri, 2002). Secara singkat dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal adalah, kegiatan yang dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk intervensi untuk mengelola anggaran dalam mempengaruhi perekonomian serta memaksimalkan kesejahteraan dan stabilitas dalam bidang perekonomian.

Tujuan kebijakan fiskal menurut John F. Due dalam Rahayu (2010), mengatakan terdapat tiga tujuan dari kebijakan fiskal, yaitu :

1. Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
2. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja ( mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga – harga secara umum.
3. Untuk menstabilkan harga – harga secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Sedangkan jenis-jenis kebijakan fiskal dalam Rahayu (2010), yaitu:

1. Kebijakan Fiskal Ekspansioner: yaitu suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan belanja pemerintah dan atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produk domestik bruto dan menurunkan angka pengangguran.
2. Kebijakan Fiskal Kontraksioner: yaitu suatu kebijakan yang diambil pemerintah dengan melakukan pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengontrol inflasi.



### C. Otonomi Daerah

Dalam istilah, otonomi secara etimologi berasal dari bahasa/kata latin yaitu "autos yang berarti "sendiri", dan "nomos" yang berarti "aturan". Sehingga otonomi diartikan "pengundangan sendiri", "mengatur atau memerintah sendiri". Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari enam tahun di negara kita diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk menggeser kekuasaan. Hal itu ditegaskan oleh Kaloh (2002), bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi "daerah" dalam pengertian wilayah atau teritorial tertentu di tingkat lokal. Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik. Berbagai kelemahan masih menyertai pelaksanaan otonomi yang harus diwaspadai dalam pelaksanaannya. Prud'homme (1994) dalam Fahmi (2013) mencatat beberapa kelemahan dan dilema dalam otonomi daerah, antara lain :

1. Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin
2. Mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal.
3. Mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya *public hearing*.

#### 4. Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 dibagi menjadi tiga, yaitu : desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

#### **D. Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Menurut Kusaini (2006) Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Parson dalam Zulyanto (2010) mendefinisikan desentralisasi sebagai berbagi (*sharing*) kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, dimana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu negara.

Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 menyatakan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah pusat oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kuncoro,2009). Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis (Litvack, 1999):

1. Desentralisasi politik yaitu pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar berbagai peraturan.

2. Desentralisasi administrasi yaitu merupakan pelimpahan kewenangan tanggung jawab dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan.
3. Desentralisasi fiskal yaitu merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih tinggi dan menentukan belanja rutin maupun investasi.

Ketiga jenis desentralisasi ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan merupakan prasyarat untuk mencapai tujuan dilaksanakannya desentralisasi yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai *money follow function* mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*). Mahi (2002) menjelaskan bahwa dalam prinsip *money follow function* dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *expenditure assignment* dan *revenue assignment*. Pendekatan *expenditure assignment* menjelaskan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sedangkan *revenue assignment* menjelaskan tentang peningkatan kemampuan keuangan melalui alih sumber pembiayaan pusat kepada daerah dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan.

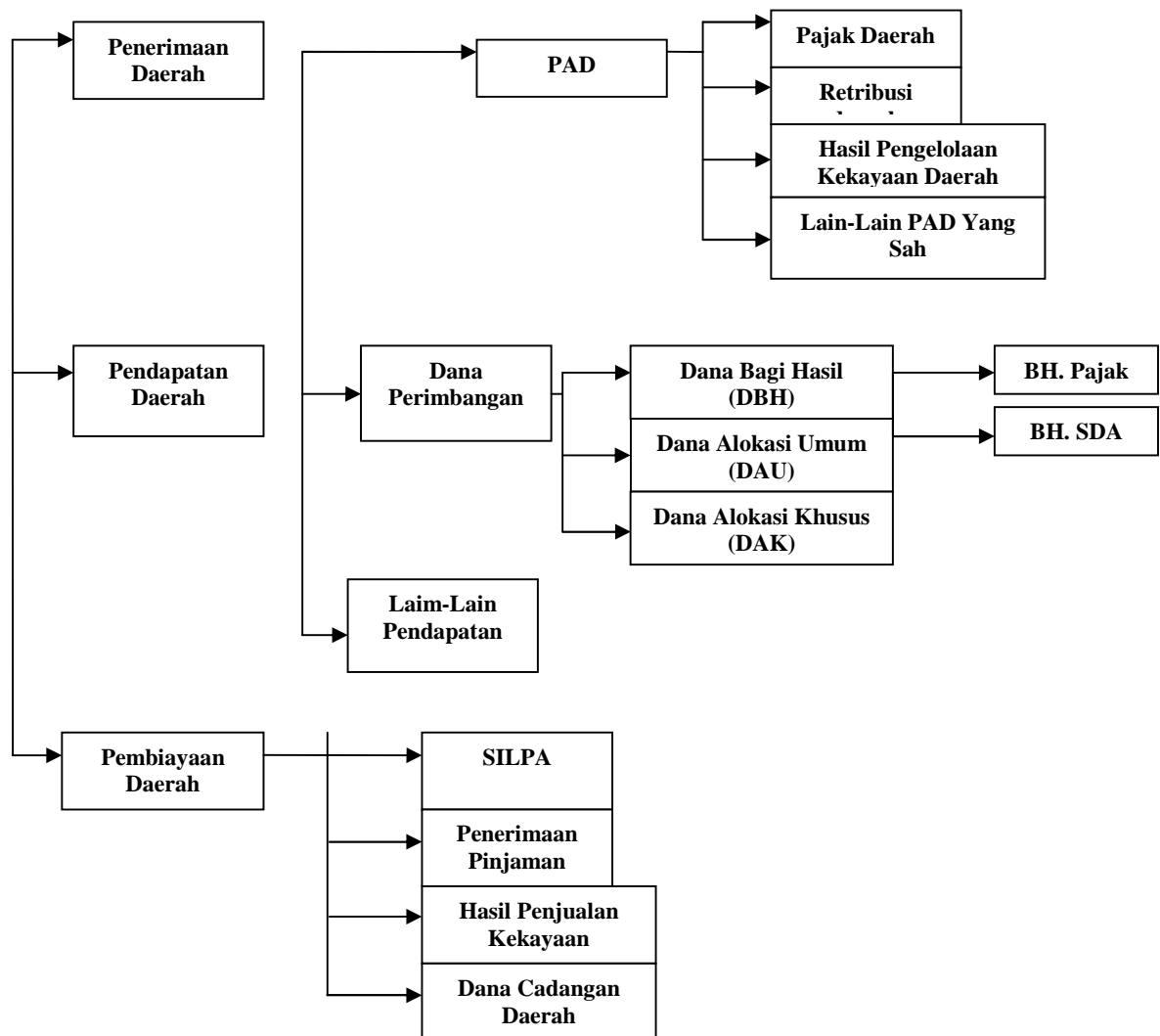
### **E. Desentralisasi Fiskal Indonesia**

Implementasi otonomi daerah yang direncanakan akan diberlakukan pada tahun 2001 yang mengacu pada dua Undang-Undang, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (UU-PKPD) merupakan undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan atau desentralisasi fiskal antara Pemerintah Pusat-Daerah berdasarkan pembagian fungsi dan wewenang penyelenggaraan pemerintah diantara pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah (Alishjhabana, 2000).

Pelaksanaan desentralisasi Indonesia fiskal sebagai salah satu instrument kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain (Mardiasmo, 2009):

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik didaerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional.
4. 4.Tata kelola,transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 penerimaan daerah dalam era desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:



Sumber: UU Nomor 3 Tahun 2004

### **Gambar 2. Komponen Penerimaan Daerah Diera Desentralisasi Fiskal Di Indonesia**

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 mekanisme transfer kebijakan dari pusat ke daerah telah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) (Mardiasmo, 2009). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, struktur komponen belanja dapat diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi dan ekonomi (jenis belanja). Lebih lanjut dijelaskan bahwa berdasarkan Pemendagri

Nomor 13 Tahun 2006, belanja terdiri dari belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga) dan belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal).

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan (SILPA, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pembayaran pinjaman, penerimaan piutang daerah) dan pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, investasi (penanaman modal) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah).

## **F. APBD**

### **1. Pengertian APBD**

UU Nomor 33 Tahun 2004, "Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD". Saragih (2003), "APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD)". Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2004) adalah sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci,
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut dan adanya biaya-biaya

yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka,
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

Sebagai alat pemerintah yang digunakan dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan, anggaran dalam organisasi publik memiliki beberapa fungsi. Menurut Mardiasmo (2002) Fungsi utama anggaran daerah adalah sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi, evaluasi kinerja, memotivasi manajemen, dan menciptakan ruang publik.

## **2. Struktur APBD**

Struktur APBD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah”.

### **A. Pendapatan Daerah**

Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Jenis-jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Pajak daerah
  - b. Retribusi daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)
    - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN)
    - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
    - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
    - b. Jasa giro
    - c. Pendapatan bunga

- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah
- e. Penerimaan komisi
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda distribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

## 2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan, meliputi:

### a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1. Bagi Hasil Pajak
- 2. Bagi Hasil Bukan Pajak

### b. Dana Alokasi Umum

### c. Dana Alokasi Khusus

## 3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah dibagi menurut jenis pendapatan meliputi:

- a. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat,
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan bencana alam
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah



- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

## **B. Belanja Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai
- b. Bunga
- c. Subsidi
- d. Hibah
- e. Bantuan sosial
- f. Belanja bagi hasil
- g. Bantuan keuangan
- h. Belanja tidak terduga

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal

## **C. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 60 menyebutkan bahwa

penerimaan pembiayaan daerah, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA)
- b. Pencairan dana cadangan
- c. Penerimaan pinjaman dan obligasi
- d. Hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan
- e. Penerimaan kembali pembayaran pinjaman
- f. Penerimaan piutang daerah

## 2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah, meliputi:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Investasi (penanaman modal) pemerintah daerah
- c. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo
- d. Pemberian pinjaman daerah

## G. Investasi

Teori pertumbuhan Harrod-Domar menepatkan investasi sebagai faktor penting dalam perekonomian suatu negara. Menurut Harrod-Domar setiap perekonomian pada dasarnya harus menyisihkan atau menabung suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau mengganti barang-barang modal yang mengalami penyusutan atau rusak dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal (*capital stock*). (Todaro dan Smith, 2006).

Model Pertumbuhan Solow menyatakan bahwa persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal: investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk keperluan perluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang (Mankiw, 2003).

Jhingan (2004) investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua sisi, yaitu: dari sisi permintaan, investasi akan menciptakan atau menghasilkan pendapatan (*return on investment*), sedangkan dari sisi penawaran investasi meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan persediaan atau akumulasi modal. Chenery dan Carter dalam Sodik (2005) mengemukakan pemikiran tentang pentingnya investasi khususnya dalam bentuk penanaman modal asing dalam pembangunan di negara berkembang yaitu bahwa dana eksternal sebagai sumber investasi dapat dimanfaatkan oleh negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan Solow dan pendapat Todaro dan Smith (2003) yang menegaskan bahwa investasi memainkan peran penting dalam penggerakan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal dari peningkatan investasi akan memperbesar kapasitas produksi, meningkatkan kesempatan kerja, menaikkan pendapatan nasional sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi.

#### **H. Akumulasi Modal Manusia**

Todaro dan Smith (2003) mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja merupakan salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dari sisi penawaran, jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih besar berarti akan meningkatkan tenaga kerja produktif. Sedangkan dari sisi permintaan, pertambahan jumlah penduduk berarti meningkatkan ukuran pasar domestik, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Model pertumbuhan Solow menunjukkan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Dalam model Solow, suatu perekonomian dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempunyai persediaan modal per pekerja pada kondisi mapan yang rendah dan juga tingkat pendapatan pekerja yang rendah.

Lim (1996) mengatakan bahwa tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di negara Jepang dan Korea disebabkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mudah menyerap tenaga kerja dan beradaptasi dengan perubahan

teknologi dan ekonomi yang terjadi. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Akai dan Sakata (2002) yang menggunakan modal manusia sebagai variabel kontrol untuk meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dengan menggunakan regresi data panel dari lima puluh negara bagian di Amerika Serikat dalam periode waktu 1992-1996, memperlihatkan bahwa kuantitas dan kualitas sumber daya manusia regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika.

### **I. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyangkut sumber-sumber penerimaan dan kewajiban belanja. Lobao dan Kraybill dalam Yamodah (2007) mengatakan bahwa terdapat tiga pandangan atau perspektif utama mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian, yaitu *Pro-Decentralization*, *Anti-Decentralization*, dan *Intermediate Decentralization*.

Perspektif *Pro-Decentralization* didasarkan pada keterbatasan pemerintah pusat dan manfaat atau efisiensi yang terjadi ketika pemerintah terdesentralisasi. Weingast (1995) mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum. Hal ini dikarenakan oleh:

- a. Pemerintah daerah yang memahami kebutuhan masyarakatnya
- b. Keputusan pemerintah daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
- c. Adanya persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sehingga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi didaerahnya.

Tiebout (1956) mengatakan bahwa jika penyediaan barang dan jasa publik diselenggarakan oleh pemerintah secara tersentralisasi maka akan mengakibatkan rendahnya kompetisi yang dihadapi oleh pemerintah pusat ketika pembuatan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik, disamping proses pengambilan keputusan sendiri harus melewati sistem birokrasi yang

panjang sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi tidak efisien. Oleh sebab itu, agar penyediaan barang dan jasa publik menjadi lebih efisien dan efektif, penyediaan barang publik harus dilakukan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih lengkap tentang kebutuhan dan karakter masyarakat di daerahnya dan proses pengambilan keputusan terkait penyediaan barang dan jasa publik tidak harus melewati birokrasi yang panjang sehingga menjadi efisien dan efektif.

Perspektif *anti-decentralization* didasarkan pada keterbatasan pemerintah daerah dan kelemahan menepatkan tanggung jawab utama di pundak pemerintah daerah. Perspektif yang dibangun adalah desentralisasi fiskal akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan keterbatasan dari pemerintah lokal dan adanya peningkatan tekanan fiskal karena tambahan tanggung jawab. (Hariyanto, 2012). Yamoah (2007) mengemukakan bahwa kelemahan dari desentralisasi adalah kerugian dalam skala ekonomi, dimana dengan sistem desentralisasi, setiap pemerintah daerah harus mengimplementasikan agenda pertumbuhan ekonomi yang independen dari pemerintah daerah lainnya sehingga mungkin akan meningkatkan biaya per unit *output* layanan karena mereka akan beroperasi pada skala yang lebih kecil. Thiessen (2003) kelemahan pelaksanaan desentralisasi sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal dapat mengakibatkan peningkatan ketidakadilan atau disparitas regional dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
2. Beberapa ahli berpendapat bahwa pemerintah pusat secara umum dapat mencapai tingkat kualitas yang lebih tinggi dibanding dengan pemerintah yang terdesentralisasi, karena pemerintah pusat memiliki dan dapat menarik lebih banyak personel dengan kualitas yang lebih baik melalui pemberian gaji dan peluang karier yang baik (Prud'homme, 1994).
3. Implementasi desentralisasi fiskal di negara kecil dan berpendapatan rendah cenderung tidak menguntungkan. Thiessen lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan desentralisasi fiskal diperlukan biaya tetap yang

tidak sedikit sehingga akan menyerap sebagian besar kapasitas anggaran yang jumlahnya sangat terbatas.

4. Desentralisasi fiskal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang terkait dengan kebijakan stabilisasi yang akan lebih sulit untuk dilakukan.

Perspektif *Intermediate-decentralization* menekankan pada pentingnya lokasi dan hubungan kelembagaan. Lobao dan Kraybill (2006) mengatakan bahwa perlu adanya perhitungan antar variasi daerah ketika mempelajari peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dan redistribusi. Pengaruh dari pergeseran dalam kewenangan pemerintah dan dinamika internal yang berbeda antar daerah, menjadikan kemampuan dan kemauan pemerintah daerah untuk mengambil tanggung jawab tambahan dari desentralisasi akan bervariasi sehingga mengakibatkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi akan berbeda antar daerah satu dan daerah lain.

#### **J. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan Zhang dan Zou (1998) dalam jurnal yang berjudul "*Fiscal Decentralization, Public Spending and Economic Growth In China*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana alokasi sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dan daerah telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sejak reformasi yang dimulai pada akhir 1970. Variabel penelitian adalah pertumbuhan GDP, pertumbuhan tenaga kerja, rasio investasi, ekspor-impor, pajak, inflasi, desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan alokasi sumber daya fiskal dari desentralisasi ekonomi telah mempengaruhi pengeluaran pemerintah dan memperoleh hasil yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional China sejak tahun 1970.

Tobin Im dan Seung Jong Lee (2004) dalam jurnal yang berjudul "*Time, Decentralization and Development*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penting dalam proses politik desentralisasi. Variabel penelitian adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat desentralisasi fiskal dan politik

desentralisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penting dalam proses politik desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hasil perubahan politik memiliki nilai mutlak, penepatan waktu yang salah secara signifikan mempengaruhi alokasi sumber daya desentralisasi dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Davoodi dan Zou (1998) dalam jurnal yang berjudul "*Fiskal Decentralization and Economic Growth: A cross-country study*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Variabel penelitian adalah GDP, rasio pajak, belanja pemerintah, investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan negatif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara berkembang namun tidak demikian yang terjadi pada Negara maju.

Imi Atsushi (2005) dalam jurnal yang berjudul "*Desentralization and Economic Groth Revisited: An Empirical Note*". Tujuan penelitian adalah untuk meninjau kembali hubungan desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi. Variabel penelitian adalah *political freedom*, tingkat pertumbuhan penduduk, *human capital*, level awal pertumbuhan PDB (*Initial level of GDP*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada akhir tahun 1990-an desentralisasi fiskal merupakan suatu instrumen dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi perkapita.

Rodden, Eskeland, Litvack (2003) dalam jurnal yang berjudul "*Fiscal Decentralization and the Challenge of Hard Budget Constraint*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana desentralisasi fiskal menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah lokal. Variabel penelitian adalah anggaran pemerintah lokal, total pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah dapat diukur dengan proporsi defisit fiskal terhadap total pendapatan.

Alisjahbana (2000) dalam jurnal yang berjudul “desentralisasi fiskal dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Jawa Barat. Variabel penelitian ini adalah sumber penerimaan daerah yaitu PAD dan DAU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simulasi dan estimasi implikasi UU nomor 25 tahun 1999 untuk Jawa Barat menunjukkan Pemerintah Propinsi harus menyerahkan/ mengurangi peran dan kewenangannya ke Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan perubahan fungsi/kewenangan dan perkiraan penurunan penerimaan APBD, yaitu sebesar 50% dibandingkan dengan penerimaan APBD pada pengaturan lama. Sebaliknya, untuk daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat secara keseluruhan, peningkatan peran dan kewenangan yang berasal dari pusat dan propinsi diperkirakan harus dapat dibiayai oleh peningkatan 90-100% penerimaan APBD. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dalam era desentralisasi tidak hanya tergantung pada aspek penerimaan daerah, kemampuan ataupun kreativitas masing-masing daerah. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerja sama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah di setiap tingkat dituntut untuk dapat menjadi fasilitator yang dapat memadukan kepentingan berbagai pihak dan meletakkan dasar-dasar kepentingan bersama.

Khusaini dan Prasetya (2004) dalam jurnal yang berjudul “Kinerja Pemerintah Daerah Di Era Desentralisasi Fiskal: Analisis Daerah Terhadap Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kabupaten Malang terhadap pengembangan ekonomi daerah. Variabel penelitian adalah APBD dari sisi penerimaan (PAD), APBD dari sisi pengeluaran (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan), PDRB, populasi penduduk, rasio pengeluaran sektoral terhadap total pengeluaran, kontribusi nilai produksi UKM, kontribusi sektoral, potensi ekonomi daerah, potensi manusiawi, potensi alam, letak. Hasil penelitian adalah dampak anggaran terhadap pengembangan ekonomi lokal era



sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal dari hasil estimasi yang dilakukan menunjukkan nilai yang negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal kurang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Utomo dan Sumarsono (2009) dalam jurnal yang berjudul “Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap sektor publik dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Variabel penelitian adalah pertumbuhan ekonomi, dana desentralisasi, rasio belanja total pemerintah daerah terhadap total belanja pusat, efisiensi sektor publik, rasio belanja tidak terduga terhadap APBD. Hasil penelitian adalah desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran berpengaruh signifikan positif terhadap inefisiensi pengeluaran publik, inefisiensi pengeluaran publik berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 6. Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Data</b>	<b>Variabel</b>	<b>Alat Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Zhang dan Zou (1997)	Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China	Data <i>time series</i> dari tahun 1970-1992	Pertumbuhan GDP, pertumbuhan tenaga kerja, rasio investasi, ekspor-impor, pajak, inflasi, desentralisasi fiskal	Regresi linier berganda	Alokasi sumber daya fiskal dari desentralisasi ekonomi telah mempengaruhi pengeluaran pemerintah dan memperoleh hasil yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional China sejak tahun 1970.
2.	Tobin Im dan Seung Jong Lee (2007)	Time, Decentralization and Development	Data <i>time series</i> 209 negara tahun dari 1970-1992	Pertumbuhan ekonomi, tingkat desentralisasi fiskal dan politik desentralisasi	Regresi linier berganda	Hasil perubahan politik memiliki nilai mutlak, penepatan waktu yang salah secara signifikan mempengaruhi alokasi sumber daya desentralisasi dan pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Data</b>	<b>Variabel</b>	<b>Alat Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
3.	Davoodi dan Zou (1998)	Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study	Data <i>time series</i> 49 negara tahun dari 1970-1989	GDP, rasio pajak, belanja pemerintah, investasi	Regresi linier berganda	Desentralisasi fiskal memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara berkembang namun sebaliknya memiliki pengaruh positif di Negara maju
4.	Iimi Atsushi (2005)	Decentralization and Economic Growth Revisited: An Empirical Note	Data <i>time series</i> 51 negara tahun dari 1997-2001	<i>Political freedom</i> , tingkat pertumbuhan penduduk, <i>human capital</i> , level awal pertumbuhan PDB ( <i>Initial level of GDP</i> )	Regresi linier berganda (OLS) dan instrumental variabel	Pada akhir tahun 1990-an desentralisasi fiskal merupakan suatu instrument dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi perkapita.
5.	Rodden, Eskeland, Litvack (2003)	Fiscal Decentralization and The Challenge of Hard Budget Constraints	Data <i>time series</i> tahun dari 1997-2003	Anggaran pemerintah lokal, total pendapatan	Deskriptif kualitatif	Keterbatasan anggaran pemerintah dapat diukur dengan proporsi defisit fiskal terhadap total pendapatan.
6.	Alisjahbana (2000)	Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	Data <i>time series</i> tahun dari 1990-2001	PAD dan DAU	Deskriptif kualitatif	Simulasi dan estimasi implikasi UU nomor 25 tahun 1999 untuk Jawa Barat menunjukkan Pemerintah Propinsi harus menyerahkan/mengurangi peran dan kewenangannya ke Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan perubahan fungsi/kewenangan dan perkiraan penurunan penerimaan APBD.

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Data</b>	<b>Variabel</b>	<b>Alat Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
7.	Khusaini dan Prasetya (2004)	Kinerja Pemerintah Daerah Di Era Desentralisasi Fiskal : Analisis Dampak Anggaran Daerah Terhadap Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Malang	Data <i>time series</i> tahun dari 1999-2003	APBD dari sisi penerimaan (PAD), APBD dari sisi pengeluaran (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan), PDRB, populasi penduduk, rasio pengeluaran sektoral.	Regresi linier berganda	Dampak anggaran terhadap pengembangan ekonomi lokal era sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal dari hasil estimasi yang dilakukan menunjukkan nilai yang negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal kurang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
8.	Utomo dan Sumarsono (2009)	Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur	Data <i>time series</i> tahun dari 2004-2009	Pertumbuhan ekonomi, dana desentralisasi, rasio belanja total pemerintah daerah terhadap total belanja pusat, efisiensi sektor publik, rasio belanja tidak terduga terhadap APBD	Regresi linier berganda	Desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran berpengaruh signifikan positif terhadap inefisiensi pengeluaran publik, inefisiensi pengeluaran publik berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **K. Kerangka Pemikiran**

Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Mankiw (2003), Produk Domestik Bruto dapat dipandang dalam dua hal. Pertama yaitu total pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian. Kedua yaitu total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam ekonomi.

Rostow mencetuskan suatu model tahapan pertumbuhan ekonomi (*the stage of economic growth*) yang berisi bahwa proses pertumbuhan dapat dibedakan ke

dalam lima tahap dan setiap negara atau wilayah dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahapan tersebut. Adapun lima tahapan pertumbuhan tersebut antara lain; masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, gerakan kearah kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi (Rustadi, 2007).

Todaro dan Smith (2003) mengidentifikasikan bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu:

1. Akumulasi modal
2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja
3. Kemajuan Teknologi

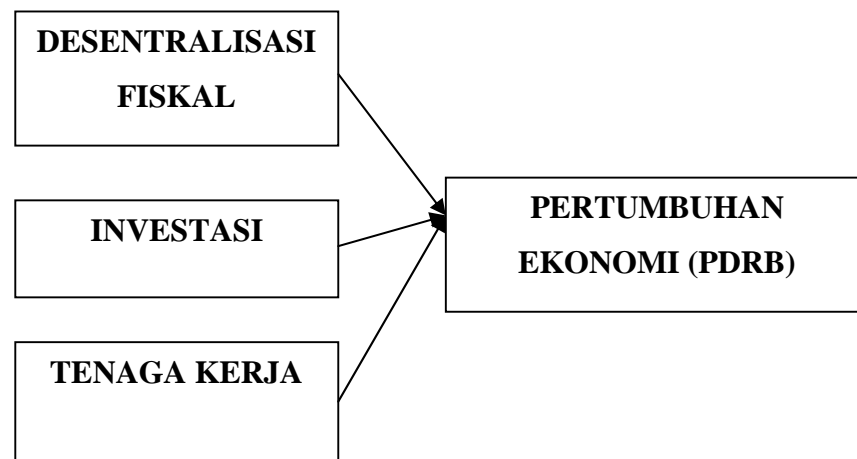
Ketiga faktor di atas juga menjadi determinan penting dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai model pertumbuhan Solow (*Solow Growth Model*) (Mankiw, 2003).

Vazquez dan McNab (2001) menjelaskan tentang studi yang mempelajari hubungan langsung desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan model pertumbuhan endogenous Barro (*Barro's Endogenous Growth Model*), dimana fungsi suatu produksi terdiri dari modal swasta dan pengeluaran publik dalam tiga tingkatan pemerintah. Oates (1993) mengatakan bahwa desentralisasi fiskal berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan efisiensi pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi. Prud'homme (1994) juga sependapat yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi daerah dimasa depan.

Kebijakan otonomi daerah berkaitan dengan tiga asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan tiga landasan pokok dalam peyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam kebijakan ini masing-masing daerah diberikan kesempatan, peluang serta tantangan dalam meningkatkan dan mengembangkan serta memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. UU nomor 32 Tahun 2004 desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka pelayanan publik. Undang-Undang

Nomor 34 tahun 2000 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 menyebutkan bahwa sumber pembiayaan yang paling penting adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Produktivitas masyarakat daerah dalam rangka pembangunan daerah akan mewujudkan suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berakhir pada pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk proses pembangunan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat dan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.



**Gambar 3. Kerangka Pemikiran Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2000-2014.**

#### **L. Hipotesis**

Hipotesis penelitian akan diidentifikasi sebagai dasar untuk menganalisa pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketiga sebagaimana yang terdapat pada

bagian permasalahan. Sedangkan untuk pertanyaan penelitian keempat tidak dilakukan dengan pengujian hipotesis, tetapi akan dijelaskan secara deskriptif.

Adapun hipotesisi penelitian akan dirumuskan sebagai berikut;

1. Diduga desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
2. Diduga investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.
3. Diduga tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.
4. Diduga desentralisasi fiskal, investasi, tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2000-2014. Penelitian ini menggunakan data yang bersifat kuantitatif, yaitu berupa data tahunan yang berbentuk angka dan dapat diukur atau dihitung.

#### **1. Jenis Data Menurut Sumbernya**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak sebelumnya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Departemen Jendral Perimbangan dan Keuangan RI, Bank Indonesia dan berbagai instansi serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data dari berbagai dokumentasi atau publikasi dari berbagai pihak yang berwenang, instansi terkait.

#### **2. Definisi variabel**

Pengertian dan batasan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **a. *Economic Growth* (EG)**

*Economic Growth* (EG) merupakan laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung dari tahun 2000-2014.

### b. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal dalam penelitian ini dilihat dari sisi penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil yang merupakan potensi asli daerah. desentralisasi fiskal dalam penelitian ini menggunakan indikator pertumbuhan PAD ditambah dengan pertumbuhan DBH dibagi dengan pertumbuhan total APBD.

Dengan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\Delta PAD + \Delta DBH}{\Delta APBD} = \frac{\left( \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \right) + \left( \frac{DBH_t - DBH_{t-1}}{DBH_{t-1}} \right)}{\left( \frac{APBD_t - APBD_{t-1}}{APBD_{t-1}} \right)}$$

Keterangan:

PAD	= Pertumbuhan pendapatan asli daerah
$\Delta$ DBH	= Pertumbuhan dana bagi hasil
$\Delta$ APBD	= Pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah
$PAD_t$	= Pendapatan asli daerah periode sekarang
$PAD_{t-1}$	= Pendapatan asli daerah periode sebelumnya
$DBH_t$	= Dana bagi hasil periode sekarang
$DBH_{t-1}$	= Dana bagi hasil periode sebelumnya
$APBD_t$	= Anggaran pendapatan dan belanja daerah periode sekarang
$APBD_{t-1}$	= Anggaran pendapatan dan belanja daerah periode sebelumnya

### c. Investasi

Investasi merupakan jumlah penanaman modal di Propinsi Lampung yang terdiri PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dari tahun 2000-2014 dengan menggunakan indikator pertumbuhan total investasi.

Dengan rumusan sebagai berikut:

$$\Delta INV = \frac{INV_t - INV_{t-1}}{INV_{t-1}}$$



Keterangan:

- $\Delta INV$  = Pertumbuhan investasi  
 $INV_t$  = Investasi pada periode sekarang  
 $INV_{t-1}$  = Investasi pada periode sebelumnya

#### d. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan jumlah penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun yang telah bekerja di Propinsi Lampung tahun 2000-2014 yang dihitung dengan menggunakan indikator pertumbuhan tenaga kerja.

Dengan rumusan sebagai berikut:

$$\Delta TK = \frac{TK_t - TK_{t-1}}{TK_{t-1}}$$

Keterangan:

- $\Delta TK$  = Pertumbuhan tenaga kerja  
 $TK_t$  = Tenaga kerja pada periode sekarang  
 $TK_{t-1}$  = Tenaga kerja pada periode sebelumnya

## B. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teori-teori dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*). Seluruh data yang digunakan dimasukkan dalam program statistik komputer yaitu *software* Eviews 5 untuk dilakukan pengujian.

Dengan demikian spesifikasi model menjadi sebagai berikut:

$$Eg = \beta_0 + \beta_1 DFg + \beta_2 INVg + \beta_3 TKg + \epsilon_t$$

Dimana;

Eg	= Pertumbuhan ekonomi	(persen)
DFg	= Pertumbuhan Desentralisasi Fiskal	(persen)
INVg	= Pertumbuhan Investasi	(persen)
TKg	= Pertumbuhan Tenaga Kerja	(persen)
$\alpha_0$	= Konstanta	
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$	= Koefisien regresi	
$\epsilon_t$	= Error term	

Agar data menjadi stasioner dan untuk menghindari masalah *spurious regression* maka harus dilakukan uji stasioneritas.

### C. Pengujian Model *Time Series*

#### 1. Uji Stasioneritas

Pada data *time series* terdapat sifat stasioneritas dalam data tersebut, sifat kestasionerian (*stationary*) sangat penting bagi *time series*, karena jika suatu data *time series* tidak stasioner maka hanya dapat dipelajari perilakunya pada waktu tertentu saja (yaitu waktu yang hendak diamati), sedangkan untuk peramalan (*forecasting*) akan sulit dilakukan. Masalah lain yang sering muncul pada data nonstasioner adalah masalah “*spurious regression*” atau regresi *nonsense*/tak bermakna, masalah ini sering terjadi jika deret nonstasioner diregresikan terhadap deret nonstasioner.

Untuk mengetahui stasioneritas data, digunakan *unit root test*. Jika hasil uji menolak hipotesis adanya *unit root* untuk semua variabel, berarti semua variabel adalah stasioner atau dengan kata lain variabel-variabel terkointegrasi pada  $I(0)$ , sehingga estimasi akan dilakukan dengan menggunakan regresi linier biasa (OLS). Jika hasil uji *unit root* terhadap level dari variabel-variabel menerima hipotesis adanya *unit root*, maka berarti bahwa semua data adalah tidak stasioner atau semua variabel terintegrasi pada orde  $I(1)$ . Jika estimasi dengan menggunakan teknik OLS dipaksakan, maka dapat terjadi regresi palsu (*spurious regression*). Jika semua variabel adalah tidak stasioner, estimasi terhadap model dapat dilakukan dengan teknik kointegrasi.

## 2. Uji Kointegrasi

Konsep kointegrasi pada dasarnya adalah untuk mengetahui equilibrium jangka panjang di antara variabel-variabel yang di observasi. Kadang kala dua variabel yang masing-masing tidak stasioner atau mengikuti pola random walk mempunyai kombinasi linier diantara keduanya yang bersifat *stationary*. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut saling terintegrasi atau ber-*cointegrated*. Namun jika hasil pengujian unit root menunjukkan bahwa tidak semua variabel nonstasioner, maka teknik kointegrasi tidak dapat dilakukan karena kointegrasi mensyaratkan seluruh variabel harus terintegrasi pada orde yang sama (Widarjono, 2008).

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, konsep kointegrasi adalah untuk mengetahui equilibrium jangka panjang dari variabel-variabel yang diobservasi. Suatu ciri khusus dari variabel-variabel yang terkointegrasi adalah jalur waktunya dipengaruhi oleh deviasi dari equilibrium jangka panjang. Jangka pendek dari variabel-variabelnya harus menanggapi besaran dari ketidakseimbangan jangka panjangnya. Hal ini berarti pergerakan dalam jangka pendek harus dipengaruhi oleh deviasi dari hubungan jangka panjangnya.

## 3. *Error Corellation Model* (ECM)

Setelah melakukan uji kointegrasi dan hasil pada model terkointegrasi atau dengan kata lain mempunyai hubungan atau keseimbangan jangka panjang. Teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang disebut dengan *Error Correction Model* (ECM) yang dikenalkan oleh Sargan dan dipopulerkan oleh Engle-Granger (Nachrowi, 2006).

Dalam model koreksi kesalahan, pergerakan jangka pendek variabel-variabel dalam sistem dipengaruhi oleh deviasi dari equilibrium. Dari model tersebut ECM tersebut akan diperoleh koefisien ECT. Koefisien ini mengukur respon *regressand* setiap periode yang menyimpang dari keseimbangan. Menurut Widarjono (2007) koefisien koreksi ketidakseimbangan ECT dalam bentuk nilai absolut menjelaskan seberapa cepat waktu diperlukan untuk mendapatkan nilai keseimbangan.

Pada dasarnya ECM mengandung suatu bentuk koreksi kesalahan yang menjamin hubungan jangka panjang terpenuhi. ECM ini diperoleh dari residual estimasi persamaan kointegrasi.

Fungsi pertumbuhan ekonomi dalam persamaan linier dapat ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Eg = \beta_0 + \beta_1 DFG + \beta_2 EINVg + \beta_3 ETKg + \epsilon_t$$

Dimana;

$Eg$  = Pertumbuhan ekonomi (persen)

$DFg$  = Pertumbuhan Desentralisasi Fiskal (persen)

$INVg$  = Pertumbuhan Investasi (persen)

$TKg$  = Pertumbuhan Tenaga Kerja (persen)

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi

$\epsilon_t$  = Error term

Sedangkan model persamaan ECM untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$DEg = \beta_0 + \beta_1 DDFg + \beta_2 DINVg + \beta_3 DTKg + \beta_4 Ect + \epsilon_t$$

Dimana;

$DEg$  = Perubahan Pertumbuhan ekonomi (persen)

$DDFg$  = Perubahan Pertumbuhan Desentralisasi Fiskal (persen)

$DINVg$  = Perubahan Pertumbuhan Investasi (persen)

$DTKg$  = Perubahan Pertumbuhan Tenaga Kerja (persen)

$Ect$  = Merupakan koefisien ECM yang digunakan untuk melihat seberapa besar kecepatan semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikat dalam jangka pendek.

$\epsilon_t$  = Error term

## D. Pengujian Hipotesis

### 1. Uji F (Keberartian Keseluruhan)

Untuk mengetahui peranan variabel bebas secara keseluruhan dilakukan dengan uji F. Kesimpulan uji F dapat diperoleh dengan membandingkan antara F statistic dengan F tabel pada tingkat tertentu dan derajat bebas tertentu (Gujarati, 1997).

Pengujian ini dilakukan dengan Formula Hipotesis sebagai berikut :

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ , berarti variable independen tidak berpengaruh terhadap variable dependen.
- $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ , berarti variable independen berpengaruh terhadap variable dependen.

Pengujian dapat dilakukan dengan rumus:

$$F = \frac{ESS/K}{RSS/(N - K - 1)}$$

Bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, berarti secara bersama-sama variable bebas berpengaruh nyata dan signifikan terhadap variable terikat. Bila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima, berarti secara bersama-sama variable bebas tidak berpengaruh secara nyata dan signifikansi terhadap variabel terikat.

### 2. Uji t (Uji Keberartian Parsial)

Uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji t pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan derajat kebebasan  $df = (n-k-1)$ . Hipotesis yang dirumuskan:

$H_0: \beta_i = 0$  variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

$H_a: \beta_i > 0$  variabel bebas berpengaruh positif terhadap variabel terikat

Kriteria pengujian untuk  $i = 1,2,3$  adalah:

a. Desentralisasi

Ho :  $1 = 0$  Desentralisasi fiskal secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2000-2014.

Ha :  $1 > 0$  Desentralisasi fiskal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2000-2014.

b. Investasi

Ho :  $1 = 0$  Investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2000-2014.

Ha :  $1 > 0$  Investasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2000-2014.

c. Tenaga Kerja

Ho :  $1 = 0$  Tenaga kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2000-2014.

Ha :  $1 > 0$  Tenaga kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2000-2014.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan, simpulan yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
2. Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
3. Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
4. Desentralisasi Fiskal di Provinsi Lampung yang dilihat dari sisi penerimaan menunjukkan trend derajat desentralisasi yang meningkat. Hal ini berarti bahwa angka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sudah mulai berkurang dengan adanya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sedangkan desentralisasi fiskal di Provinsi Lampung yang dilihat dari sisi pengeluaran yaitu alokasi belanja daerah yang bersumber dari belanja barang dan jasa serta belanja modal menunjukkan trend yang berbeda-beda. trend belanja pegawai mengalami penurunan, trend belanja barang dan jasa mengalami peningkatan serta trend belanja mengalami peningkatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya suatu kebijakan dalam rangka menciptakan peningkatan sumber keuangan yang berasal dari pajak daerah sehingga tidak lagi terjadi penurunan jumlah pajak daerah di Provinsi Lampung.
2. Perlu adanya suatu perbaikan dalam hal penetapan kebijakan yaitu perizinan, birokrasi dan penetapan pajak dari kegiatan investasi, agar dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Provinsi Lampung.
3. Perlu adanya penciptaan lapangan pekerjaan yang baru melalui kegiatan investasi agar dapat mengatasi pertumbuhan tenaga kerja yang terus meningkat di Provinsi Lampung



## DAFTAR PUSTAKA

- Akai, Nobuo and Sakata, Masayo. 2002. Fiscal Decentralization Contributes To Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data For The United States. *Journal of Urban Economics* 52 (2002) 93-108.
- Alfaro, Laura. 2003. Foreign Direct Investment and Growth: Does The Sector Matter?. Harvard Business School.
- Alisjahbana.S. Armida. 2000. Desentralisasi Fiskal dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah. Jawa Barat.
- Bank Indonesia. 2014. Kajian Ekonomi Regional Provinsi Lampung.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- BPS. 2015. Seri Analisa Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung.
- BPS. 2017. Berita Resmi Statistik Provinsi Lampung.
- Breuss, Fritz dan Eller, Markus, 2004. Fiscal Decentralisation and Economic Growth: Is There Really A Link? *CESifo DICE Report, Journal For Institutional Comparisons*, Volume 2 No.1, Spring 2004.
- Davoodi, Hamid dan Heng-fu Zou. 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth: A cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*.
- Fahmi, Affuad Ridho. 2013. *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2007-2011*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Gujarati, N Damodar, 2004: Basic Econometrics, Fourth Edition, The McGraw-Hill Companies.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Salemba Empat. Jakarta.

- Harianto, Dedy Tri. 2012. Dampak Desentralisasi Fiskal di Provinsi Jambi. Universitas Indonesia.
- Hidayat, Syarif, 2005. *Too Much Too Soon ; Local States Elite's Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hirawan, Susiyati Bambang, 2007. Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia, Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 24 Pebruari 2007
- Imi, Atsushi, 2005. Decentralization and economic growth revisited: an empirical note, *Journal of Urban economics* 57.
- Jhingan, ML. 2004. Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaloh, J. 2002. *Mencari bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Khusaini, Muhamad. 2006. Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah, Malang : BPFEEUnbraw.
- Khusaini dan Prasetya. 2004. Kinerja Pemerintah Di Era Desentralisasi Fiskal: Analisis Dampak Anggaran Daerah Terhadap Pengembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Malang. Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi. Universitas Brawijaya.
- Kuncoro, 2009. Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada.
- Lim, D. 1996. Explaining Economic Growth: A New Analytical Framework. Vermont; Edward Elgard Publish.
- Litvack, Jennie, 1999. Decentralization. Washington. DC. World Bank.
- Lobao, Linda and David S. Kraybill. 2005. The Emerging Roles of Country Governments in Metropolitasn and Nonmetropolitan Areas: Findings from a National Survey. *Economic Development Quarterly*, 19, 245-259.
- Mahi, Raksaka, 2002. Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah. Makalah disampaikan dalam Kursus Reguler Angkatan XXXV. LEMHANAS. Jakarta, 25 Agustus 2002.

- Malik, Shahnawaz, dkk, 2006. Fiscal Decentralisation and Economic Growth in Pakistan. *The Pakistan Development Review*. 45: 4 part ii (Winter 2006).
- Mankiw, N. Gregory, 2003. Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. Perpajakan Edisi Revisi 2002. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Mardiasmo. 'Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi:2005-2008' dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara. Andie. Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi. Penerbit Kompas, Jakarta, 2009.
- Nachrowi, Djalal N, dan Hardius Usman (2006), Penggunaan Tehnik Ekonometri, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Oates, Wallace E. 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal* Vol.46 No.2 (June, 1993).
- Prud'homme, R. 1994. On the dangers of Decentralization. *Policy Research Working Paper* 1252. World Bank, Washington DC.
- Rahayu, Ana Sri. 2010. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta. Bumi Aksara.
- Republik Indonesia. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Rodden, Eskeland, Litvack. 2003. Fiscal Decentralisation and the Challenge of Hard Budget Constraint. *The Journal Urban Public Economics*. University of Santiago.
- Rustiadi, dkk, 2007. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Institute Pertanian Bogor.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sjahfrizal. 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. Prisma. Yogyakarta:LP3ES.
- Smith, Adam. 2003. Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.qw

- Smith, Brian C. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of The State*. George Allen, London.
- Sodik, Jamzani dan Nuryadin, Didi. 2005. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasis pada 26 Propinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.10(2), 157-170.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Tanzi, V. 1996. Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspects. *Annual World Bank Conference on Development Economics*. The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank.
- Thiessen, Ulrich.2003. Fiscal Decentralization and Economic Growth in High Income OECD Countries. *Fiscal Studies* Vol. 24 No.3.
- Tiebout, Charles.M.1956. A Pure Theory of Local Expenditures. *The Journal of Political Economy*, Vol. 64, No.5. The University of Chicago Press.
- Tobin Im dan Seung Jong Lee, 2004. Time, Decentralization and Development. *Journal Of Urban Economics*.
- Todaro, Michael P dan Smith Stephen C. 2003. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid I Edisi Kesembilan, Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P dan Smith Stephen C. 2009. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid II Edisi Ketiga, Erlangga, Jakarta.
- Utomo dan Sumarsono. 2009. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi Sektor public dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *JESP Vol.1, No. 2*.
- Vazquez, M Jorge dan McNab M Robert, 2001. Fiscal Desentralization & Economic Growth., *Working Paper #01-1, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University*.
- Weingast, Bary R. 1995. The Economic Role of political Institutions Market-Preserving Federalism and Economic Development. *JLEO*, Vol 11. Standford University.
- Widarjono, Agus.2008.*Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*.Ekonisa.Jakarta.
- Yamoah, Afia Boadiwaa. 2007. The Effects Of Fiscal Decentralization and Economic Grawth in the United States. *Journal of Urban Economics*,

45:228-239.

Zhang, Tao dan Heng-fu Zou. 1997. *Fiscal Decentralization, Publik Spending, and Economic Growth In China*. Journal of Public Economucs. Washington DC.

Zhang Tao dan Heng-fu Zou. 1998. Fiscal Decentralization. Public Spending and Economic Growth in China. *Journal of Public Expenditure* 67, 221-240.

Zulyanto, Aan. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. Universitas Diponogoro.